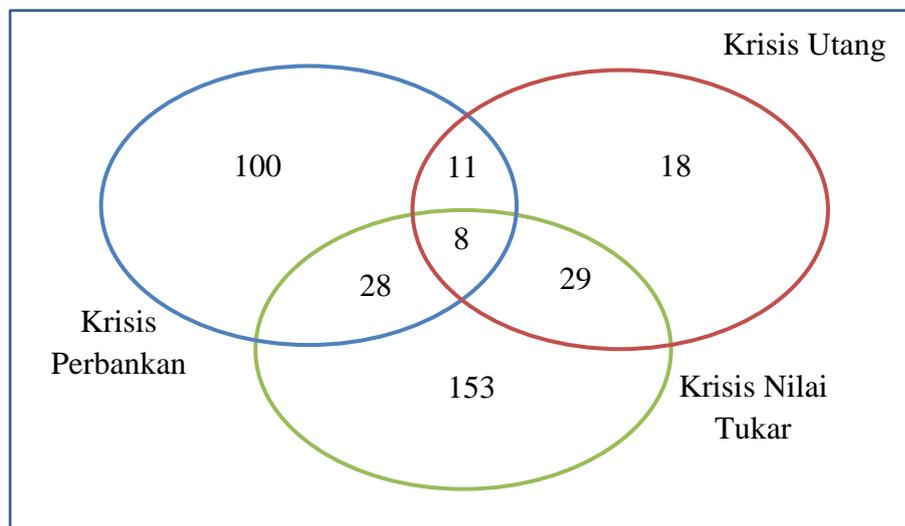


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Krisis keuangan, kegagalan pasar, dan *economic bubble* telah terjadi secara berulang. Fenomena ini dipicu oleh perkembangan sistem keuangan modern yang diawali dengan runtuhnya perjanjian *Bretton Woods (the Bretton Woods Agreement)* pada Agustus 1971 (Ascarya *et al.*, 2015). Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bordo *et al.* (2001) bahwa setelah runtuhnya perjanjian *Bretton Woods* tahun 1971, dimana sistem standard mata uang yang dikonversi dengan emas runtuh, krisis keuangan lebih sering terjadi dan memiliki dampak sistemik yang meningkat, bahkan lebih luas penyebarannya.



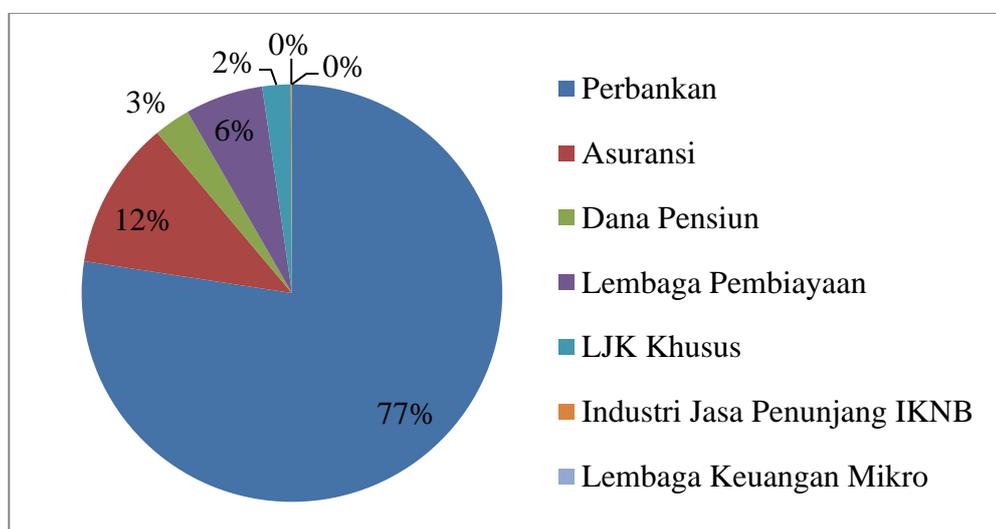
Sumber: Ascarya *et al.* (2015)

**Gambar 1.1**

Intensitas Krisis Keuangan Dunia

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sejak runtuhnya perjanjian *Bretton Woods* tahun 1971 menurut Laeven dan Valencia (2012), setidaknya telah terjadi 431 peristiwa krisis keuangan yang melanda dunia, terdiri dari 153 krisis nilai tukar, 100 krisis perbankan, dan 18 krisis utang. Lebih dari itu, terdapat krisis gabungan yang meliputi 68 *twin crisis* dan 8 *triplet-crisis*.

Krisis perbankan tercatat merupakan krisis kedua yang paling sering terjadi dan merupakan penyebab utama terjadinya krisis keuangan global saat ini. Sektor perbankan memainkan peran penting dalam membiayai perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia adalah suatu perekonomian yang bergantung pada keberadaan perbankan sebagai sumber pembiayaan. Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 dominasi sektor perbankan mencapai 77 persen atas total aset keuangan di Indonesia.

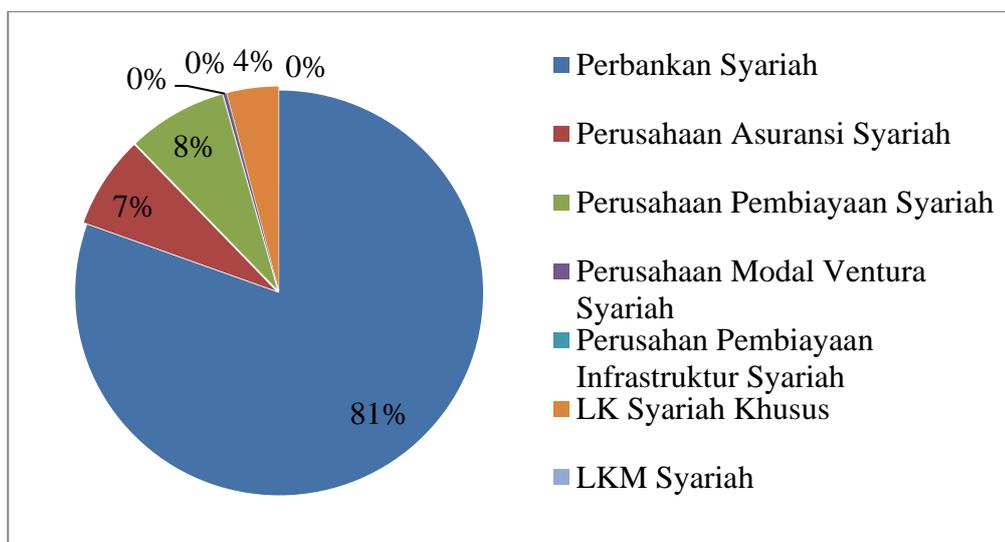


Sumber: Laporan Tahunan OJK, 2016

### Gambar 1.2

Komposisi Aset Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

Komposisi aset lembaga perbankan terhadap industri keuangan di Indonesia didominasi pula oleh perbankan Syariah. Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa proporsi perbankan Syariah mendominasi aset lembaga keuangan Syariah hingga mencapai 81 persen. Porsi aset ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim.



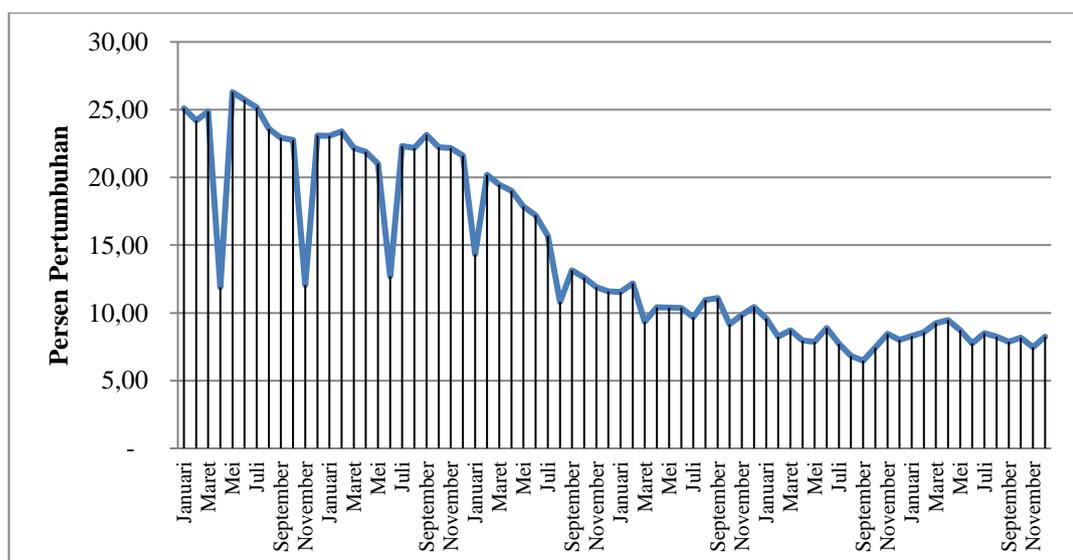
Sumber: Laporan Tahunan OJK, 2016

**Gambar 1.3**

### Komposisi Aset Keuangan Syariah di Indonesia

Kredit perbankan atau yang dikenal dalam keuangan Syariah sebagai pembiayaan (*financing*) memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ketersediaan kredit memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi dan bagi perusahaan untuk melakukan aktifitas investasi yang amat sulit jika hanya dibiayai dengan dana pribadi (Utari *et al*, 2012).

Lebih lanjut Utari *et al.* (2012) menjelaskan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat dan stabilitas makroekonomi terjaga, kepercayaan dan optimisme pelaku pasar untuk bertransaksi modal akan terus meningkat sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan kredit. Sebaliknya pada saat kondisi perekonomian memburuk lembaga perbankan akan melakukan penyesuaian untuk menjaga tingkat modal melalui *deleveraging*<sup>1</sup> serta meningkatkan *loan loss provisioning*<sup>2</sup>, sehingga pada gilirannya jumlah kredit bahkan output perekonomian akan menurun.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2017

**Gambar 1.4**

Pertumbuhan Kredit Perbankan 2012-2017 (yoy)

<sup>1</sup> *Deleveraging* adalah upaya perusahaan dalam rangka mengurangi rasio pasiva terhadap ekuitas.

<sup>2</sup> *loan loss provisioning* merupakan kebijakan perusahaan dalam menahan laju pertumbuhan kredit yang terlampaui ekspansif.

Melihat data pertumbuhan kredit di Indonesia, pada Gambar 1.4 menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 pertumbuhan kredit perbankan sudah memasuki masa perlambatan. Hal ini ditunjukkan dengan total penyaluran kredit per April 2014 hanya mencapai Rp. 2.317,2 triliun atau sekitar 11.89 persen pertumbuhannya (*yoy*). Angka pertumbuhan ini sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang dapat mencapai total penyaluran kredit 24.03 persen. Angka penurunan pertumbuhan kredit ini terus berulang hingga Desember 2017.

Masih lesunya perekonomian domestik diiringi dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) mendorong perbankan lebih berperilaku rasional dan berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya kepada dunia usaha. Lebih dari itu, memasuki masa stagnasi perekonomian saat ini pelaku usaha cenderung menahan diri untuk mengajukan transaksi kredit di sektor perbankan, hal ini dapat dilihat dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 hanya mencapai 5.17 persen. Angka ini sedikit berada dibawah angka pertumbuhan nasional yang diproyeksi oleh pemerintah sebesar 5.20 persen.

Namun, permasalahan yang dikhawatirkan timbul apabila peningkatan pertumbuhan kredit yang signifikan bahkan terlampau menjauh diatas normal. Dalam kondisi ini, perbankan dikatakan dapat memicu terjadinya krisis pada sektor moneter yang berdampak lebih jauh kepada sektor riil. Pada kondisi yang demikian ini pula perbankan dikatakan berperilaku prosiklikal. Prosiklikal dalam sistem perbankan mengacu pada interaksi sistem perbankan dan ekonomi riil yang saling

menguatkan dan cenderung memperkuat amplitudo<sup>3</sup> siklus bisnis. Hal ini telah dipahami sebagai salah satu sumber penting yang menyebabkan ketidakstabilan sistemik pada sistem keuangan (Ascarya *et al*, 2015).

Amplitudo dalam siklus kegiatan ekonomi mengacu pada keterkaitan antara periode ekonomi *boom* dan *bust*. Periode *boom* mengindikasikan terjadinya amplitudo positif dalam prosiklikalitas perbankan terhadap kegiatan ekonomi. Sedangkan *bust* menandakan terjadinya amplitudo negatif dalam prosiklikalitas perbankan terhadap kegiatan ekonomi. Amplitudo positif/negatif siklus kegiatan ekonomi terhadap siklus kredit (perbankan) disusun atas dasar sejauh mana kapasitas kredit perbankan dapat mendorong kegiatan ekonomi ketika kondisi ekonomi menuju perluasan/perlambatan (ekspansi/kontraksi).

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji terkait dengan amplitudo siklus kegiatan ekonomi. Seperti contoh, Landau (2009), Aikman *et al.* (2010), Borio (2012) dan Alamsyah *et al.* (2014). Alamsyah *et al.* (2014) menjelaskan bahwa liberalisasi keuangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya ukuran amplitudo siklus keuangan. Selain itu penerapan kebijakan moneter yang dinilai terlalu longgar pada saat periode ekspansi ekonomi, yang kemudian didorong pula oleh penentuan kebijakan di sektor riil yang *mismatches* dengan kebijakan moneter turut berkontribusi atas ukuran amplitudo dan frekuensi siklus keuangan. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada dorongan yang kuat dari titik balik (*turning point*) siklus ke fase kontraksi (*bust*).

---

<sup>3</sup> Amplitudo dalam siklus keuangan dapat menggambarkan tingkat kedalaman siklus saat berada pada fase kontraksi maupun ekspansi.

Selain itu, Aikman *et al.* (2010) dalam penelitiannya yang berfokus pada analisis siklus kredit dan hubungannya terhadap siklus bisnis, menyatakan bahwa siklus kredit memiliki perbedaan dengan siklus bisnis, hal ini dibuktikan dengan ukuran frekuensi dan amplitudo keduanya yang berbeda. Sementara itu, menurut Borio (2012) bahwa yang menentukan panjang amplitudo gelombang dalam sistem keuangan (siklus pertumbuhan kredit) adalah rezim kebijakan yang diterapkan. Selain itu, Landau (2009) pernah mengkaji tentang perbankan Syariah bahwa prosiklikalitas perbankan Syariah tidak dikategorikan sebagai prosiklikalitas buruk yang meningkatkan amplitudo siklus bisnis, menciptakan *bubbles economy*, dan instabilitas keuangan.

Pada saat sekarang ini, ditengah kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu dan kurang responsifnya pelaku pasar atas kebijakan otoritas moneter, perilaku prosiklikalitas perbankan dapat menjadi kendala bagi otoritas moneter untuk melakukan transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dan kredit. Akibat dari kakunya tingkat suku bunga perbankan, memberikan kesan bahwa kebijakan BI *rate* guna mendorong pertumbuhan sektor riil menjadi kurang efektif. Dengan demikian, pemahaman terhadap siklus kredit perbankan perlu dipahami secara mendalam. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pengukuran Amplitudo dan Frekuensi Pada Prosiklikalitas Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia”**.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

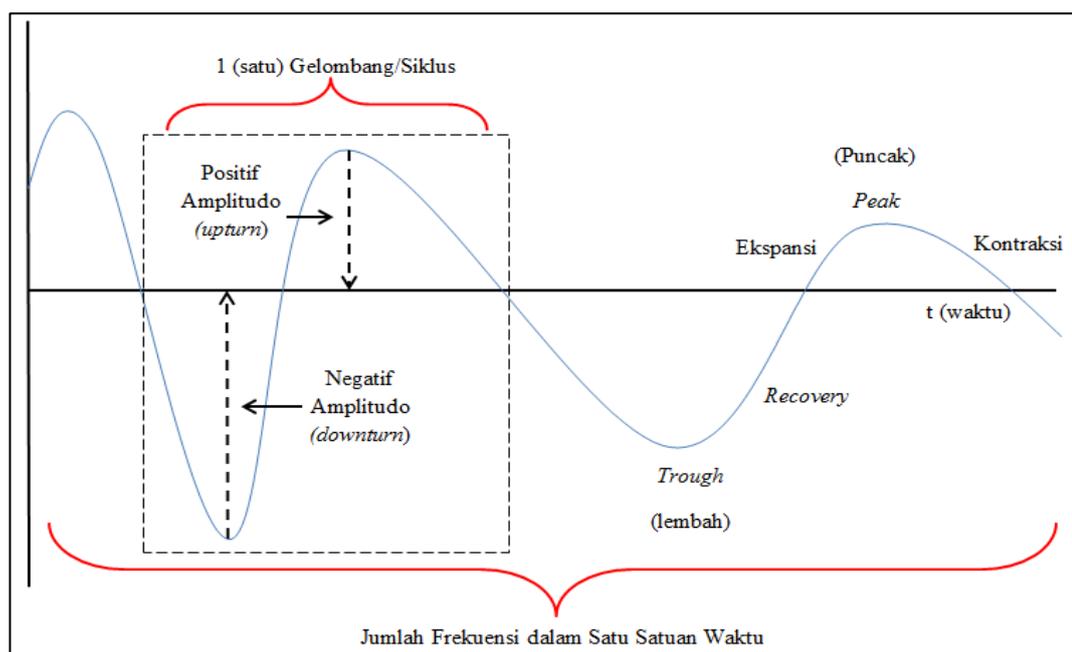
Guna memperjelas penelitian, agar permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tidak melebar maka diperlukan batasan masalah. Namun sebelumnya penting untuk memahami perbedaan antara siklus bisnis, siklus keuangan dan siklus kredit.

Menurut Bank Indonesia, siklus keuangan berbeda dengan siklus bisnis. Perbedaan terletak pada tujuan penyusunan dan frekuensi yang digunakan. Siklus keuangan dimaksudkan untuk menjelaskan kondisi stabilitas sistem keuangan, sedangkan siklus bisnis dimaksudkan untuk mengamati fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut siklus keuangan menggunakan frekuensi jangka menengah, sedangkan siklus bisnis menggunakan frekuensi jangka pendek.

Menurut Wimanda dan Djuranovic (2013) siklus keuangan disusun atas dasar 3 (tiga) variabel utama: (i) total penyaluran kredit; (ii) harga saham, dan; (iii) imbal hasil SBN 10 tahun, yang di-riil-kan dengan data IHK (Indeks Harga Konsumen). Sedangkan dalam siklus perekonomian menggunakan data pertumbuhan PDB riil. Elemen pembentuk siklus keuangan salah satunya adalah kredit, dimana kredit diakumulasi dari pembiayaan yang disalurkan oleh sektor keuangan. Selain itu, karena siklus keuangan banyak pula dikaitkan dengan kredit perbankan, maka dalam penelitian ini menggunakan total penyaluran kredit.

Dalam penelitian ini difokuskan hanya pada pola pembentukan siklus kredit dari sektor perbankan melalui variabel total penyaluran kredit (jika dalam perbankan konvensional disebut kredit, sedangkan dalam perbankan Syariah disebut pembiayaan). Alasan penentuan batasan ini mengacu pada penelitian Utari

*et al.* (2012) dan Ascarya *et al.* (2015) bahwa karakteristik prosiklikalitas sektor perbankan melalui penyaluran kredit merupakan elemen risiko sistemik yang harus diperhitungkan dengan seksama oleh otoritas moneter. Oleh karenanya, otoritas moneter perlu melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan agar pembentukan siklus kredit perbankan berlaku *less-procyclicality*.



**Gambar 1.5**

Komponen Pembentuk Siklus

### C. Rumusan Masalah

Bahwa menjadi sangat *urgent* upaya dalam memitigasi risiko sistemik (*financial fragility*) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Risiko sistemik yang timbul diyakini terjadi karena adanya perilaku prosiklikalitas. Perilaku prosiklikalitas dalam pertumbuhan kredit perbankan yang dinilai terlampaui

menjauhi diatas nomal, baik dalam perbankan Syariah maupun konvensional menjadi salah satu pemicu utama terjadinya krisis keuangan.

Oleh karenanya, pemahaman atas perilaku prosiklikalitas perbankan Syariah dan konvensional dalam menjaga stabilitas sitem keuangan menjadi penting. Terlebih Indonesia dihadapkan dalam kenyataan sistem kebijakan moneter dibawah kendali sistem moneter ganda (*dual monetary system*). Sehingga diperlukan pemahaman kebijakan makroprudensial Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk respon dalam menyikapi perbedaan karakteristik antara perbankan Syariah dan konvensional. Maka dari itu, rumusan masalah yang dapat diambil antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran amplitudo siklus kredit perbankan Syariah dibandingkan dengan siklus kredit perbankan konvensional?
2. Bagaimana ukuran frekuensi siklus kredit perbankan Syariah dibandingkan dengan siklus kredit perbankan konvensional?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ukuran amplitudo siklus kredit perbankan Syariah dibandingkan dengan siklus kredit perbankan konvensional?
2. Untuk mengetahui ukuran frekuensi siklus kredit perbankan Syariah dibandingkan dengan siklus kredit perbankan konvensional?

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis. Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan cabang ilmu ekonomi keuangan dan perbankan Islam.
- b. Menjadi dasar dan tambahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan keilmuan secara langsung dalam mengkaji risiko pada perbankan Syariah dan konvensional di Indonesia.
- b. Bagi civitas akademika Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat menjadi salah satu aset penelitian ilmiah.
- c. Bagi pemangku kebijakan meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga keuangan dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan risiko pada perbankan Syariah dan konvensional di Indonesia.